

Hegemoni, Perlawanan Rakyat Terhadap Pengembangan Pariwisata di Bali: Kasus Reklamasi Pantai Padanggalak di Kesiman dan Pembongkaran Kafe di Kuta

I Gusti Ngurah Bagus

Abstrak

Tahun 1990-an, masyarakat Bali mengalami keresahan dan gejolak besar. Keresahan dan gejolak itu merupakan bagian dari transformasi budaya yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari proses pembangunan menyeluruh oleh Orde Baru, yang mengakibatkan terjadinya transformasi dari agraris ke non-agraris. Transformasi ini tidak dapat dipisahkan dari politik ekonomi Orde Baru yang sangat sentralistik yang dalam satu sisinya harus diakui mampu membuat peningkatan di pelbagai bidang, termasuk kesadaran akan masyarakat dan bernegara, meskipun semuanya dilaksanakan dengan sistem militer dengan latar belakang massa mengambang. Kesadaran ini muncul terhadap otoritarianisme pembangunan yang dikendalikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang ditandai oleh terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

Keresahan dan gejolak di atas mengacu kepada pembangunan terumata berkaitan dengan kebijakan pengembangan pariwisata sejak tahun 1985, atau sejak dibukanya politik baru mengenai pariwisata. Dalam sejarahnya, kebijakan pengembangan pariwisata secara besar-besaran membutuhkan tanah yang luas karena terintegrasinya obyek dan dari tarik wisata, hotel, golf, dan fasilitas pendukung lainnya menjadi satu kesatuan. Hal itu memuncak pada akhir 1980-an dan melambung terus hingga akhir 1990-an.

Kesadaran dan kegelisahan masyarakat muncul karena dirasakan akan memarjinalkan masyarakat dari lingkungan dan budayanya sendiri, karena banyak tanah telah dikonversikan dan diambil oleh masyarakat luar Bali. Mulailah muncul perlawanan yang digerakkan oleh kelompok intelektual bersama mahasiswa, wartawan, dan budayawan, untuk menentang keadaan itu, seperti yang terjadi pada kasus BNR (Bali Nirwana Resorts) di Tanah Lot, Kabupaten Tabanan. Namun, upaya itu menemukan kegagalannya, yang berarti proyek pengembangan berjalan terus. Meskipun demikian, dalam arus pengembangan pariwisata seperti itu, perlawanan tersebut tetap dilakukan terhadap kesewenangan pemerintah daerah, terumata pada waktu kepemimpinan Gubernur Prof. Dr. Ida Bagus Oka. Tercatat ada dua perlawanan sebelum Reformasi 1998 yang mampu dimenangkan oleh rakyat terhadap kesewenangan pemerintah tersebut. Justru hal itu terjadi pada tahun 1997, ketika masih jayanya pemerintahan Orde Baru, meskipun diakui arah untuk menggoyahkan pemerintah telah berlangsung lama di Bali. Kasus pertama adalah perlawanan yang dilakukan terhadap reklamasi pantai Padanggalak, di Desa Kesiman, Kotamadya Denpasar, disebelah utara Pantai Sanur. Reklamasi ini dilakukan oleh satu perusahaan yang bersekongkol dengan sebuah koperasi milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali padahal pantai ini secara turun temurun merupakan tempat masyarakat adat setempat untuk melaksanakan ritual penyucian simbol-simbol agama Hindu pada setiap peralihan tahun baru Caka.

Perlawanan untuk menentang reklamasi tersebut berasal dari tokoh Puri Kesiman Anak Agung Ngurah Kusuma Wardhana yang belum lama berselang menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan DPRD dari Fraksi Golongan Karya. Dengan

sokongan kaum intelektual yang ada di Denpasar beserta kelompok-kelompok lainnya, pelbagai protes terhadap reklamasi pantai dilakukan dengan sengit. Terjadilah pertarungan yang berakhir dengan kekalahan para investor yang didukung oleh para birokrat Pemerintah Daerah Tingkat I.

Kasus yang kedua menyangkut pembongkaran dengan tujuan peniadaan kafe-kafe yang bermunculan di Pantai Kuta, Kabupaten Badung, yang dikelola oleh koperasi milik Angkatan Darat yang mendapat naungan dari pemerintah daerah setempat. Terjadilah pertarungan yang sengit dengan pelbagai lika-likunya antara pengelola kafe-kafe tersebut dan masyarakat adat setempat. Dengan didukung oleh kaum intelektual pula, hak masyarakat adat atas pengelolaan pantai dapat dikembalikan.

Arti dari kedua kasus di atas adalah, di tengah pemerintahan yang otoriter, masyarakat dengan dukungan kaum intelektual mampu mempertahankan haknya atas hegemoni yang dilakukan oleh pemerintah melalui pengembangan pariwisata yang tidak berpihak kepada masyarakat setempat. Ini merupakan suatu perlawanan yang sangat berani mengingat adanya trauma masyarakat yang akan memfatalkan nasib rakyat. Semua ini menandai adanya dimensi baru dalam hubungan antara negara dan masyarakat.